

# OVERVIEW

# PAGU INDIKATIF

# 2026

Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## Pengarah:

**Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.**  
Kepala Badan Keahlian DPR RI

## Penanggungjawab:

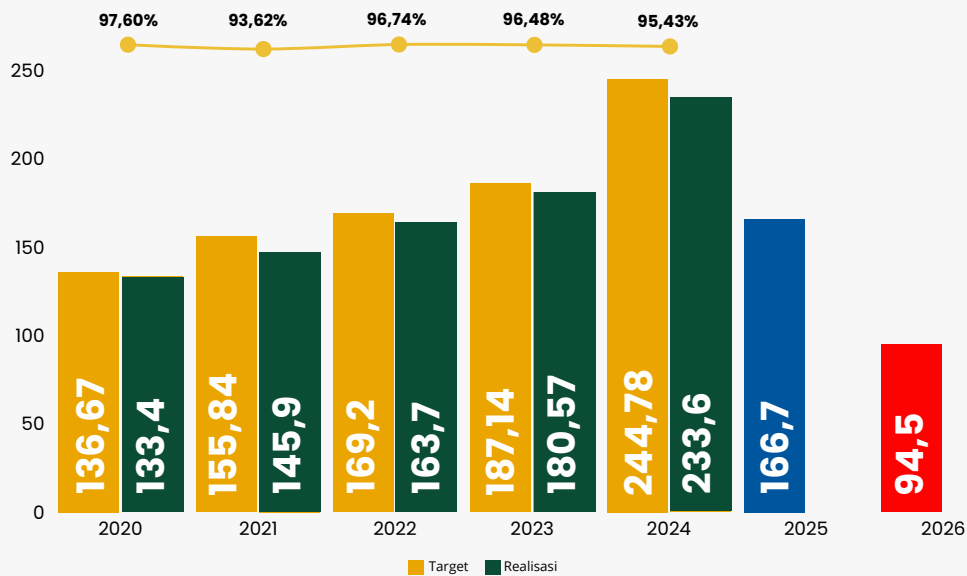
**Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA**  
Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

## Penulis:

**Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM**  
**Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP.**  
**Orlando Raka Bestianta, S.E.**



## Pagu dan Realisasi LKPP Tahun 2020–2026 (Miliar Rupiah)



Sumber: LK LKPP 2020-2024; NK APBN 2025; Kem PPKF 2026



APBN 2025

**Rp166,7 miliar**

**Efisiensi**

**Rp117,11 miliar**

29,75% dari Pagu

**Efisiensi**

**Rp49,60 miliar  
(29,75%)**

**Program Dukungan Manajemen**

**Rp108,45 miliar (65,05%)**

Rp65,90 miliar  
Belanja Pegawai

Rp27,98 miliar  
Belanja Ops

Rp14,59 miliar  
Belanja Non Ops

**PBJ Nasional**

**Rp8,66 miliar  
(5,2%)**

Sumber: RDP Komisi XI dengan LKPP, 12 Februari 2025



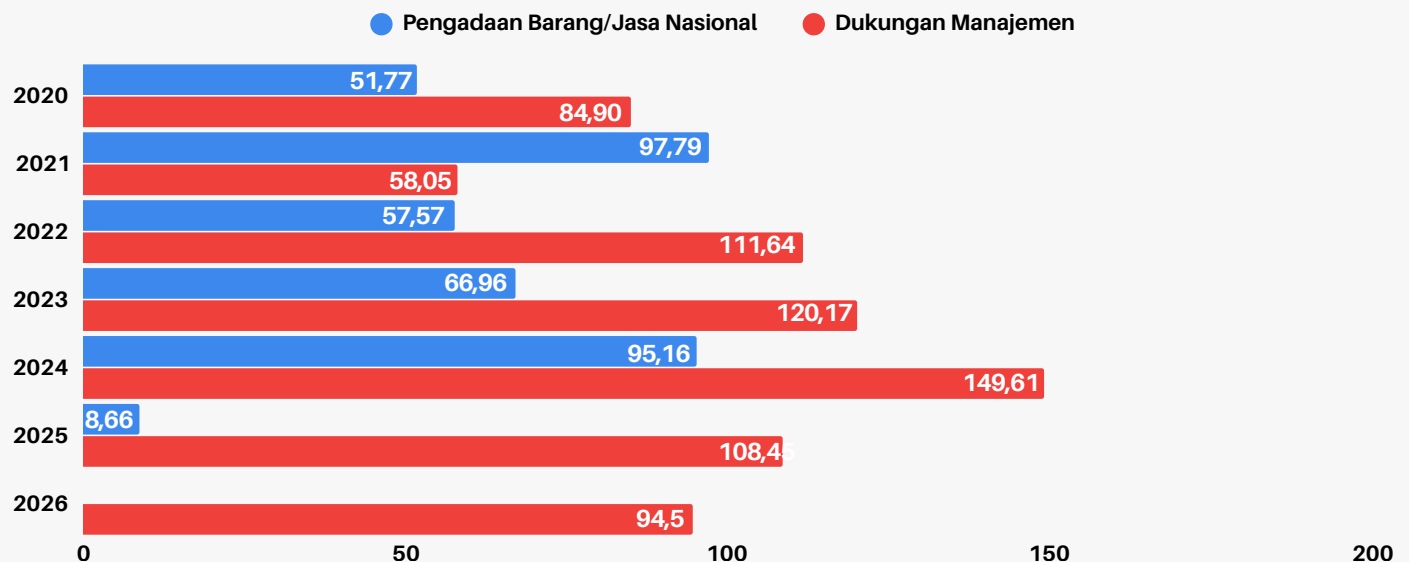
Pagu Indikatif 2026  
**Rp94,5 miliar**

Program Dukungan Manajemen  
**Rp94,5 miliar (100%)**



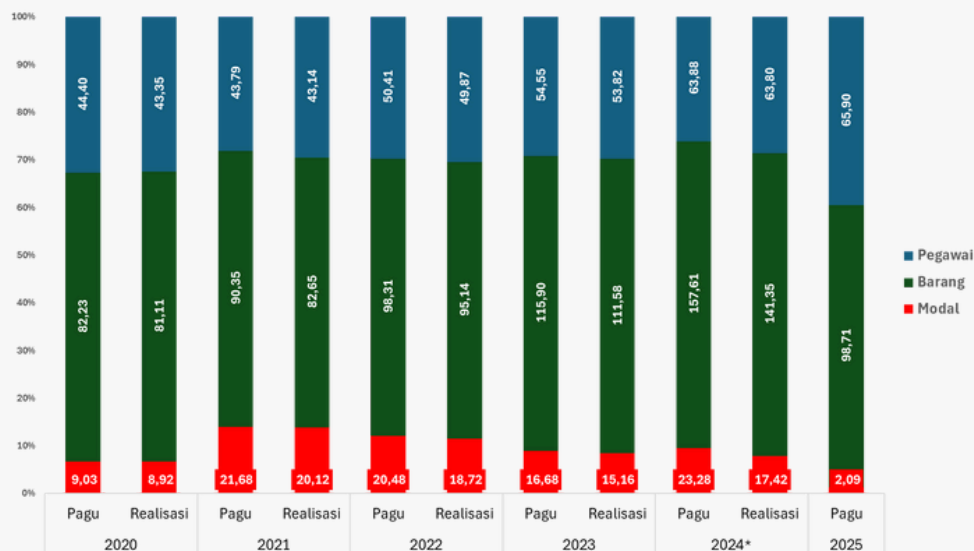
Sumber: KEM PPKF 2026

## Perkembangan Belanja LKPP Berdasarkan Program (Miliar Rupiah)



Sumber: LK LKPP 2020-2024; Sumber: RDP Komisi XI dengan LKPP, 12 Februari 2025; dan Kem PPKF 2026

## Pagu dan Realisasi LKPP per Program Tahun 2020–2025 (Miliar Rupiah)



Sumber: LK LKPP 2020–2024; Laporan Monitoring dan Evaluasi LKPP Desember 2024  
Ket: \*)angka realisasi unaudited

### HIGHLIGHT

#### Perkembangan Anggaran

- Rata-rata realisasi anggaran LKPP periode 2020–2024 adalah sebesar 96,12% dan tergolong tinggi, namun sebaran dari realisasi anggaran LKPP belum merata atau tidak konsisten pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena masih terdapat deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana (RPD).
- Pagu awal LKPP pada tahun 2025 adalah sebesar Rp166,7 miliar. Sekitar 29,75 persen atau berkurang sekitar Rp49,5 miliar dari pagu awal LKPP direalokasi dalam rangka efisiensi fiskal. Adapun upaya strategis yang dilakukan LKPP dalam mendukung kebijakan efisiensi ini antara lain efisiensi belanja operasional, optimalisasi layanan secara *hybrid*, efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, penerapan WFO dan WFA bagi pegawai, *paperless office*, efisiensi kegiatan kajian dan analisis, menyusun skala prioritas yang objektif dan terukur, dan memperkuat kolaborasi dengan *stakeholder*.
- Pada tahun 2020, total anggaran LKPP dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional sebesar 4,4 persen. Tahun 2021, 22,2 dari total anggaran digunakan untuk mendukung Prioritas Nasional. Sebesar 18,4 persen dari keseluruhan anggaran LKPP, digunakan untuk mendukung Prioritas Nasional. Tahun selanjutnya, 22,4 persen dari total anggaran LKPP telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. Pada tahun 2024, dari total anggaran yang ada, sebesar 14,1 persen telah dimanfaatkan untuk mendukung Prioritas Nasional. APBN 2025, dari pagu anggaran LKPP dialokasikan sebesar 14,95 untuk mendukung Prioritas Nasional.

#### Catatan atas Pagu Indikatif Tahun 2026

- Pagu indikatif LKPP pada tahun 2026 mengalami penurunan yang cukup signifikan,** jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp72,2 miliar. Hal ini disebabkan karena LKPP hanya menjalankan satu program yakni Program Dukungan Manajemen. Artinya, pagu indikatif sebesar Rp94,5 miliar dialokasikan seluruhnya untuk Program Dukungan Manajemen.

## Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ

### Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K



Target:

40%

Realisasi:

41,72%

Capaian:

104,3%

### Persentase realisasi belanja pengadaan PDN



Target:

90%

Realisasi:

90,08%

Capaian:

100,09%

## Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan

### Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"



Target:

155

K/L/Pemda

Realisasi:

181

Capaian:

116,77%

## Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP

### Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP



Target:

80,10

Realisasi:

81,97

Capaian:

102,33%

## Capaian Kinerja Utama

- LKPP melakukan perubahan indikator kinerja pada tahun 2024 menjadi 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja sasaran strategis semula 5 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2020–2024.
- Pada Periode 2020–2024 sebagaimana dalam RPJMN, LKPP memiliki beberapa kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional (PN). Kegiatan tersebut termasuk dalam PN 1, Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dan PN 7, Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
- Kinerja LKPP tergolong sangat baik dengan capaian yang selalu berada diatas 100 persen, rata-rata untuk capaian strategisnya mencapai 105,87 persen. Jika ditilik per indikator sasaran program pada tiap sasaran program dalam sasaran strategis, semuanya berada diatas target yang sudah ditetapkan.
- Kinerja LKPP yang sangat baik tersebut, masih menemukan kendala. Pada sasaran strategis 1 masalahnya antara lain:
  - Pencatatan belanja PBJ K/L/Pemda yang dilakukan oleh PPK belum dilakukan dengan optimal dikarenakan PBJ dilaksanakan secara non-sistem sehingga pencatatannya masih manual
  - Pada sisi Usaha Mikro, Kecil, Koperasi (UMK-K) spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan K/L belum dapat dipenuhi oleh UMK-K dan keterbatasan produk UMK-K
- Kendala pada sasaran strategis 2 antara lain:
  - Rendahnya penggunaan *e-purchasing*
  - SDM PBJ pada K/L/Pemda yang kompeten masih kurang dikarenakan stigma JF PPBJ merupakan profesi dengan risiko hukum yang tinggi.
  - Kurangnya komitmen pimpinan instansi dalam mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ.
- Kendala pada sasaran strategis 3 antara lain:
  - Pemahaman Tugas Tim RB: Masih diperlukan optimalisasi pemahaman peran anggota Tim Pengelola RB General dan Tematik, karena sebagian anggota masih menganggap pelaksanaan RB sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.
  - Keselarasan Rencana Aksi dengan Indikator: Rencana Aksi, realisasi, dan bukti dukung yang ada belum sepenuhnya relevan dengan indikator RB General dan tema RB Tematik, sehingga perlu penyesuaian untuk meningkatkan capaian skor.
  - Koordinasi Pembaruan Rencana Aksi: Terdapat pembaruan Rencana Aksi oleh tim yang tidak dikonfirmasi dengan Tim Penilai Internal dan Koordinator RB, menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.
  - Ketepatan Waktu Pelaporan: Perlu peningkatan ketepatan waktu dalam pelaksanaan, pelaporan, dan penyampaian Rencana Aksi melalui Portal RB Nasional, meskipun portal tetap dapat diakses melewati batas waktu.